



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# LKJIP

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

20  
22



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, Kasih sayang dan IjinNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 telah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu OPD yang memiliki tugas dan fungsi, diberi amanah oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mendukung kemajuan pembangunan Kalimantan Timur, maka bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tersebut berupa laporan kinerja yang sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014.

Pelaporan kinerja ini bertujuan memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi kinerja bagi pihak-pihak yang memerlukan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik yang menyangkut substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari semua pihak, guna perbaikan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami untuk masa-masa yang akan datang.

Samarinda, 03 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

**Drs. Sufian Agus, M.Si**  
**Pembina Utama Muda IV/c**  
**NIP. 196602041988031016**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 1 (satu) sasaran, dengan kategori capaian **sangat baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	2
C. Struktur Organisasi .....	3
D. Sumber Daya Manusia .....	5
E. Aspek Strategis Organisasi .....	6
F. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) .....	7
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	20
C. Perjanjian Kinerja .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya ..	24
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	28
C. Analaisi Capaian Kinerja .....	29
D. Realisasi Anggaran .....	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim .....	72
B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa yang Akan Datang .....	72
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi .....	4
--------------------------------------	---

**DAFTAR TABEL**

Table 1.1	Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan.....	5
Table 1.2	Rekap PNS berdasarkan Pendidikan dan Gender .....	6
Table 1.3	Sarana dan Prasana Kerja .....	9
Table 2.1	Perencanaan Strategis .....	15
Table 2.2	Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran.....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama .....	21
Table 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
Table 2.5	Target Belanja Badan Kesbangpol Tahun 2022.....	22
Table 2.6	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .....	23
Table 3.1	Hasil Evaluasi Tahun 2021 .....	24
Table 3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021 .....	24
Table 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	28
Table 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi kerja Tahun 2022.....	33
Table 3.5	Realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022.....	34
Table 3.6	Komponen Perhitungan Indeks Kalimantan Timur .....	35
Table 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra.....	37
Table 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2022 .....	37
Table 3.9	Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Provinsi Kaltim Tahun 2022 .....	39
Table 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022 .....	41
Table 3.11	Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Tahun 2022 .....	41
Table 3.12	Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA Tahun 2022.....	42
Table 3.13	Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tahun 2022 .....	45
Table 3.14	Realisasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021 .....	49

Table 3.15 Data Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2022 .....	50
Table 3.16 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2022 .....	59
Table 3.17 Daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2022 .....	60
Table 3.18 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022 .....	62
Table 3.19 Daftar Data Konflik, Potensi Konflik dan Penyelesaian Masalah Tahun 2022 .....	64
Table 3.20 Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....	67
Table 3.21 Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
2. Data Dukung Capaian Kinerja Tahun 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan Negara khususnya upaya untuk mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dasar pembentukan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Badan Kesbangpol Prov Kaltim, Dan keputusan menteri dalam negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan melalui Anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan mengacu pada dokumen perencanaan serta berdasarkan pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Badan Kesbangpol atas kinerja yang dilaksanakan dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut lingkup penyusunan LKjIP akan memberikan kondisi obyektif pada tahun 2022, perencanaan strategis, target

dan pencapaian kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **B. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik

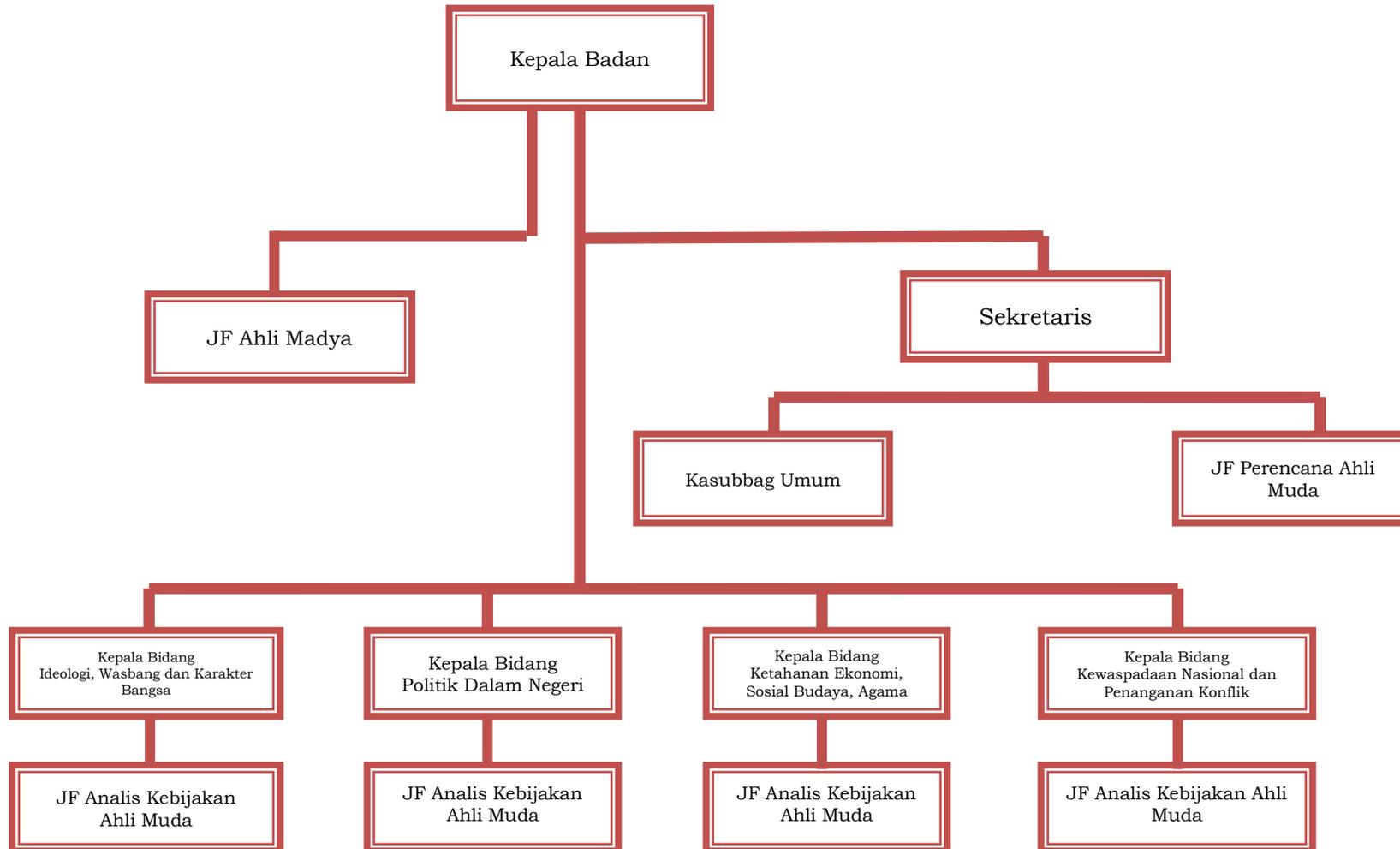
dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan kesatuan bangsa dan politik provinsi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur;

### **C. Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan tugas sehari-hari dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan 4 (empat) Bidang yang membawahi 8 (delapan) Sub Bidang. Kemudian Pada tanggal 31 Mei 2022, Gubernur Kalimantan Timur melantik beberapa pejabat di Ruang lingkup Badan Kesbangpol sehingga secara rinci merubah STOK Badan Kesbangpol Prov Kalimantan Timur, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur



#### D. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan kegiatan organisasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 mempunyai personil sebanyak 50 orang terdiri dari 7 pejabat struktural, 10 fungsional, 23 orang pejabat pelaksana, dan 10 orang tenaga kontrak.

Komposisi jabatan dalam struktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2022 antara lain : 1 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 5 Jabatan Administrator, serta 1 Jabatan Pengawas.

Adapun rekapitulasi pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

Table 1.1 Rekap Pegawai Kesbangpol Prov. Kaltim  
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
	Laki-Laki	Perempuan	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
JPT Pratama	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Administrator	3	2	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Pengawas	1	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	0
Fungsional	4	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelaksana	16	7	0	10	13	0	0	6	3	16	0	0
Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
PNS	28	12	7	20	13	0	8	11	3	18	0	0
PNS + Tenaga Kontrak	7	3	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>50</b>		<b>7</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai Perangkat Daerah dalam pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Table 1.2 Rekap PNS Kesbangpol Prov. Kaltim berdasarkan Pendidikan dan Gender

Pendidikan	Gender		Jumlah
	Pria (P)	Wanita (W)	
1	2	3	4
S.3	0	0	0
S.2	7	2	9
S.1	5	7	12
D.IV	0	0	0
D.III	2	1	3
D.II	0	0	0
D.I	0	0	0
SLTA	14	2	16
SLTP	0	0	0
SD	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>40</b>

#### E. Aspek Strategis Organisasi

Penerapan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*), mengharuskan setiap instansi pemerintah dan unit organisasi/satuan kerja mampu merumuskan dan menetapkan indikator-indikator kinerja yang memenuhi kriteria indikator yang baik sebagai ukuran keberhasilan kinerja masing-masing instansi pemerintah. Acuan indikator kinerja tingkat nasional yang dapat digunakan adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang dikeluarkan oleh kementerian/Lembaga, atau Lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai PD yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dengan menjaga stabilitas daerah agar terbebas dari ancaman dan gangguan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban, serta meningkatkan etika berpolitik, berbudaya, berdemokrasi, dan jiwa nasionalisme. Aspek Strategis Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan situasi politik yang sehat bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan meningkatkan interaksi infra struktur dan supra struktur politik.
2. Menciptakan masyarakat Kalimantan Timur yang berwawasan kebangsaan dalam rangka kondusifitas daerah.
3. Meningkatkan stabilitas sosial ekonomi yang dinamis bagi kelancaran pembangunan serta terbangunnya suatu kelembagaan sosial ekonomi di masyarakat yang kokoh.
4. Terwujudnya kondusifitas di daerah dengan mensinergikan peran-peran masyarakat dan pemerintah dalam pembangunan.

Sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah Meningkatkan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.

#### **F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)**

Permasalahan utama yang dihadapi organisasi pada Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan:
  - a. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air
  - b. Menyebarnya ideologi/paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
  - c. Meningkatnya radikalisme
  - d. Intoleransi antar agama
  - e. Sparatisme dan terorisme
  - f. Konflik SARA
  - g. Tergerusnya karakter/jati diri bangsa dan kearifan lokal
  - h. Masuknya bangsa asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia.
  - i. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi/keterbukaan mengakses informasi yang tidak diimbangi kemampuan menangkal atau mengcounter informasi negatif.

2. Kurangnya pemahaman tentang prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Bhineka Tunggal Ika dan rendahnya pemahaman terhadap arti penting orientasi serta visi bersama mengenai integritas bangsa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka tindak lanjut penanganan konflik sosial.
4. Bermunculnya paham-paham radikal, sapatisme dan terorisme untuk mengganggu persatuan dan kesatuan.
5. Penyampaian pendapat yang dilakukan secara anarkis dikalangan masyarakat dengan melecehkan simbol-simbol negara, serta kecenderungan mengedepankan kepentingan golongan dan kelompok.
6. Tingginya kuantitas keberadaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (ormas) yang belum dapat diimbangi dengan kualitas keberdayaan ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.
7. Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum. Menjalinkan kemitraan/kerjasama ormas sebagai mitra pemerintah di bidang bina ideologi, sosial dan budaya, kewaspadaan nasional dalam negeri.
8. Menjaga keberlangsungan konsolidasi kebangsaan dalam menetapkan stabilitas politik dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintahan nasional.
9. Menata lingkup ormas sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan menciptakan ormas yang mandiri dan akuntabel.
10. Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
11. Kurangnya pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama sehingga terjadi konflik belatar agama, terkait dengan kerukunan, pendirian rumah ibadah dan merebaknya aliran keagamaan/kepercayaan sinergitas antar pemerintah

(kementerian/Lembaga terkait) dengan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh agama dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama dan peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama. Pembentukan dan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlunya sosialisasi terkait dengan PBM No 9 dan No 8 Tahun 2006.

12. Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi di bidang politik bagi kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal.
13. Belum optimalnya penguatan dan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan bidang politik.
14. Kurangnya koordinasi dan sinergitas dalam upaya kelancaran pelaksanaan pemilu.

#### G. Sarana dan Prasarana Kerja

Sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan tantangan kedepan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap telah menyiapkan sarana dan prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur serta sarana penunjang lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun jumlah sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 1.3  
Sarana dan Prasarana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2022

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>ALAT BESAR</b>	4	
	- Concrete Mixer	1	Unit
	- Air Compresor	1	Unit
	- Transportable Generating Set	1	Unit
	- Pompa Air	1	Unit
<b>2</b>	<b>KOMPUTER</b>	242	
	- P.C Unit	61	Unit
	- Lap Top	37	Unit

	- Note Book	16	Unit
	- Tablet PC	1	Unit
	- Personal Komputer lainnya	3	Unit
	- CPU (Peralatan Mainframe)	2	Unit
	- Hard Disk	3	Unit
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2	Unit
	- Computer Compatible	21	Unit
	- Monitor	6	Unit
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	69	Unit
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
	- Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
	- External/ Portable Hardisk	3	Unit
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	6	Unit
	- Server	2	Unit
	- Router	2	Unit
<b>3</b>	<b>ALAT KESELAMATAN KERJA</b>	3	
	- Tenda	3	Set
<b>4</b>	<b>ALAT ANGKUTAN</b>	53	
	- Station Wagon	4	Unit
	- Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Unit
	- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	17	Unit
	- Pick Up	1	Unit
	- Sepeda Motor	13	Unit
	- Scooter	2	Unit
	- Speed Boat / Motor Tempel	2	Unit
	- Motor Boat	7	Unit
	- Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	6	Unit
<b>5</b>	<b>ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR</b>	3	
	- Cermin Besar	3	Unit
<b>6</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>	5	
	- Rak-Rak Penyimpan	1	Unit
	- Lemari Penyimpan	4	Unit
<b>7</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	1717	
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	9	Unit
	- Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	Unit
	- Mesin Ketik Listrik	5	Unit
	- Mesin Fotocopy Folio	1	Unit
	- Lemari Besi/Metal	20	Unit
	- Lemari Kayu	89	Unit
	- Rak Kayu	5	Unit
	- Filing Cabinet Besi	35	Unit
	- Brandkas	5	Unit
	- Kardex Besi	1	Unit
	- Lemari Kaca	7	Unit
	- Papan Visual/Papan Nama	1	Unit
	- White Board	18	Unit
	- Peta	10	Unit
	- Alat Penghancur Kertas	5	Unit

- Mesin Absensi	1	Unit
- Overhead Projector	5	Unit
- White Board Electronic	1	Unit
- Alat Sidik Jari	1	Unit
- Papan Nama Instansi	4	Unit
- Papan Pengumuman	2	Unit
- Alat Kantor Lainnya	15	Unit
- Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
- Meja Kerja Kayu	2	Unit
- Meja Rapat	39	Unit
- Tempat Tidur Kayu	1	Unit
- Meja Ketik	1	Unit
- Meja Telepon	8	Unit
- Meja Podium	1	Unit
- Meja Resepsionis	3	Unit
- Meja Tambahan	14	Unit
- Meja Panjang	1	Unit
- Meja 1/2 Biro	1	Unit
- Meja Makan Besi	8	Unit
- Kursi Rapat	231	Unit
- Kursi Tamu	3	Unit
- Kursi Putar	7	Unit
- Kursi Biasa	1	Unit
- Kursi Lipat	3	Unit
- Meja Komputer	7	Unit
- Sofa	3	Unit
- Meubeleur lainnya	1	Unit
- Jam Mekanis	9	Unit
- Alat Pembersih lainnya	1	Unit
- Lemari Es	4	Unit
- A.C. Window	2	Unit
- A.C. Split	47	Unit
- Kipas Angin	10	Unit
- Rice Cooker (Alat Dapur)	368	Unit
- Rice Warmer	121	Unit
- Tabung Gas	2	Unit
- Alat Dapur lainnya	17	Unit
- Televisi	28	Unit
- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	2	Unit
- Loudspeaker	7	Unit
- Sound System	16	Unit
- Compact Disc	1	Unit
- Wireless	1	Unit
- Mic Conference	32	Unit
- Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	1	Unit
- Stabilisator	2	Unit
- Camera Video	3	Unit
- Camera film	7	Unit
- Lambang Garuda Pancasila	4	Unit

	- Gambar Presiden/Wakil Presiden	9	Unit
	- Tiang Bendera	2	Unit
	- Tangga Aluminium	1	Unit
	- Dispenser	32	Unit
	- Mimbar/Podium	1	Unit
	- Coffee Maker	8	Unit
	- Handy Cam	6	Unit
	- Karpet	1	Unit
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	47	Unit
	- Alat Pemadam/Portable	1	Unit
	- Pakaian Panas/Lengkap	3	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	22	Unit
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	57	Unit
	- Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	Unit
	- Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Unit
	- Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	22	Unit
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	116	Unit
	- Kursi Kerja Pejabat lainnya	1	Unit
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
	- Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
	- Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1	Unit
	- Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	4	Unit
	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	6	Unit
	- Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	73	Unit
	- Buffet Kayu	1	Unit
<b>8</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	<b>123</b>	
	- Compact Disc Player	3	Unit
	- Microphone/Wireless MIC	3	Unit
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	Unit
	- Digital Audio Taperecorder	1	Unit
	- peralatan studio audio lainnya (dst)	4	Unit
	- Assignment Switcher	1	Unit
	- Camera Electronic	5	Unit
	- Camera Film	2	Unit
	- Lensa Kamera	2	Unit
	- Layar Film/Projector	2	Unit
	- Motor Driver	1	Unit
	- Camera Digital	4	Unit
	- Camera Conference	3	Unit
	- Alat Studio Video Lainnya	1	Unit
	- Mesin Jilid Bundar	1	Unit
	- Telephone (PABX)	7	Unit

	- Pesawat Telephone	16	Unit
	- Handy Talky (HT)	42	Unit
	- Facsimile	3	Unit
	- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Unit
	- Unit Tranceiver Ssb Portable	1	Unit
	- Unit Tranceiver UHF Portable	1	Unit
	- Antene MF/MW Portable	2	Unit
<b>9</b>	<b>ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN</b>	<b>15</b>	
	- alat kedokteran poliklinik lainnya (dst)	15	Tas
<b>10</b>	<b>ALAT LABORATORIUM</b>	<b>27</b>	
	- alat laboratorium bahan bangunan konstruksi lainnya (dst)	2	Unit
	- Refletance	1	Unit
	- Step Up/Down (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	2	Unit
	- Stabilizer	3	Unit
	- alat laboratorium kimia lainnya (dst)	1	Unit
	- alat laboratorium makanan lainnya (dst)	2	Unit
	- Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	Unit
	- Screen Pembaras	1	Unit
	- laboratory safety equipment lainnya (dst)	1	Unit
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	3	Unit
	- alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	1	Unit
	- Pot Besar	8	Unit
	- Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1	Unit
<b>11</b>	<b>ALAT PERSENJATAAN</b>	<b>1</b>	
	- Alat Khusus SAR ( Search And Resque )	1	Set
<b>12</b>	<b>BAHAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>42</b>	
	- Buku Umum Lai-lain	38	Buku
	- Hukum	4	Buku
<b>13</b>	<b>SOFTWARE</b>	<b>3</b>	
	- Software	3	Software

Sumber Data : Inventaris Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan gambaran dan arahan kebijakan sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntut segenap penyelenggara kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur untuk secara konsisten melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik.

Penyusunan perencanaan strategis sebagai panduan kerja operasional yang visioner, sekaligus sebagai instrumen pokok dalam keseluruhan kerangka manajemen program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, juga dimaksudkan dalam rangka penyiapan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 5 (lima) tahun kedepan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang ada dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan visi dan misinya selama lima tahun ke depan (2019-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visinya adalah: **“Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat”** Dalam rangka pencapaian visi tersebut, berikut ini misi yang ditentukan sebagaimana terdapat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu:

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.

2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke 1 dan 5 yaitu **“Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas”** dan **“Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik”**. Sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan misi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata yang dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, antara lain:

Tabel 2.1  
Perencanaan Strategis Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	72,86	73.50	74.50	75.50	82	82,05

Program dan kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Sub Kegiatan/Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	<p>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p> <p>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p>	<p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta</p>

						<p>Pemantauan Situasi Politik</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta</p>
--	--	--	--	--	--	--

					<p>3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p>	<p>Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>b. Penyusunan Bahan</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>
					<p>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</p>	<p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</p> <p>a. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>b. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi</p>

						<p>Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>d. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>f. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</p>
--	--	--	--	--	--	--

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang muncul dalam RPJMD 2019-2023, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Perhitungan dilakukan dengan melalui 4 tahapan dengan berdasarkan 22 indikator dan 3 Aspek yang menjadi dasar Penilaian: 1. Perhitungan Indeks indikator data kuantitatif 2. Mempertimbangkan data Kualitatif 3. Perhitungan Indeks Vareabel 4. Perhitungan IDI	Pengumpulan dengan 4 metode: 1. Koding Dokumen/Koran 2. Wawancara mendalam 3. FGD 4. Rilis Cara perhitungan no 1 dan 2 menggunakan data kuantitatif sumber data utama sedangkan Untuk no 3 da 4 menggunakan data kuantitatif untuk mengkonfirmasi, meluruskan dan melengkapi	Kesbangpol

Sumber Data: IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan amanah dan kesepakatan dari atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja dalam melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur akan mampu mewujudkan kesinambungan kinerja dan menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap tahunnya. Dengan Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 seperti dalam tabel 2.4:

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82

#### 1. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp77.430.576.481,-. Dan melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2022 menjadi Rp.82.166.190.481,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.79.456.846.717,- (96,70%) dengan rincian untuk belanja operasi sebesar Rp.77.976.856.889,- (96,65%) dan belanja Modal sebesar Rp.1.479.846.717,- (99,82%).

#### 2. Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 2.5  
Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Anggaran Belanja (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	Rp. 10.185.726.935,-	Rp. 8.082.602.445,-	79,35%
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 11.123.273.456,-	Rp. 10.519.730.354,-	94,57%
	Belanja Hibah	Rp. 59.374.524.090,-	Rp. 59.374.524.090,-	100,00%
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 1.482.666.000,-	Rp. 1.479.989.828,-	99,82%
	Jumlah	Rp. 82.166.190.481,-	Rp. 79.456.846.717,-	96,70%

### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Anggaran Belanja operasi per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	Rp. 82.166.190.481,-	Rp. 79.456.846.717,-	96,70%

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun Sebelumnya

##### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sesuai Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 710/2499-PA/ltprov/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan hasil Evaluasi sebesar **66,97** atau predikat **“B” (Baik)**, sebagaimana tabel hasil evaluasi berikut ini:

Tabel 3.1  
Hasil Evaluasi Tahun 2021

No	Kompoenen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30	21,54	21,79
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	19,38
3	Pelaporan Kinerja	15	9,16	9,39
4	Evaluasi Kinerja	10	4,49	4,91
5	Capaian Kinerja	20	10,75	11,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,07	66,97
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>B (Baik)</b>	<b>B (Baik)</b>

##### 2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi

Sesuai hasil evaluasi atas implementasi sistem AKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdapat beberapa rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan ditindak lanjuti, yaitu:

Tabel 3.2  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2021

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut
1	2	3	4
1.	Terhadap hasil evaluasi atas perencanaan kinerja dari pemenuhannya telah	Pada tahun 2022, hal ini menjadi perhatian utama, kami sudah	Renstra telah dibuat sesuai Permendagri 86 tahun 2017.

	<p>memadai namun masih memerlukan perbaikan anantara lain:</p> <p>a. Meningkatkan kualitas dokumen RKT (rencana kerja tahunan) agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendokumentasikan hasil perhitungan yang logis dan basis data dalam menetapkan target kinerja sehingga dapat menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai.</li> <li>2. Menetapkan kegiatan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung anggaran yang memadai.</li> <li>3. Menyelaraskan dokumen PK dengan RPJMD/Renstra dan menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi).</li> </ol> <p>b. Memanfaatkan dokumen Renstra/RKT/PK untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor capaian target jangka menengah sampai tahun berjalan dan sebagai dasar mengukur keberhasilan.</li> <li>2. Memonitor rencana aksi atas dokumen PK (perjanjian kinerja) sehingga dapat dimanfaatkan untuk penganggaran dan pengorganisasian kegiatan, penyusunan (identifikasi) kinerja samapai tingkat eselon III dan IV serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja.</li> </ol>	<p>melakukan review renstra sehingga kualitas dokumen Renstra akan lebih baik lagi, kemudian renstra dapat dimanfaatkan sebagai bahan dokumen RKA dan Renja yang lebih berkualitas.</p>	<p>Renstra sebagai pedoman bagi organisasi untuk semua Aparatur Sipil Negara yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Kalimantan Timur untuk berkomitmen melaksanakan target yang ditetapkan.</p>
2.	Terhadap hasil evaluasi	Evaluasi internal	Hasil Evaluasi

	<p>atas pengukuran kinerja agar:</p> <p>Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja dalam hal:</p> <p>1. Ukuran (indikator) eselon IV agar disusun berdasarkan kriteria yang baik dan pengukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan dilakukan secara berjenjang sampai dengan level staf.</p> <p>2. Membangun dan melakukan pengumpulan data kinerja berdasarkan mekanisme yang memadai dan berstruktur (jelas metode pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan, mencatat, melakukan supervise dan berasal dari data yang valid).</p>	<p>terhadap capaian kinerja dilakukan oleh Kepala, Sekretaris dan Para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Badan Kesbang Politik dan selanjutnya hasil evaluasi capaian tersebut akan ditindaklanjuti terhadap beberapa capaian yang belum maksimal dan selanjutnya akan dikomunikasi kepada pihak-pihak terkait dan pihak yang berkepentingan.</p>	<p>Capaian Kinerja dan Tindak Lanjutnya.</p>
3.	<p>Terhadap hasil evaluasi atas pelaporan Kinerja agar:</p> <p>a. Meningkatkan penemuan laporan kinerja terkait penyajian informasi mengenai pencapaian IKU.</p> <p>b. Meningkatkan kualitas laporan kinerja terkait penyajian informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja dan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.</li> <li>- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan informasi keuangan pencapaian sasaran kinerja dan</li> </ul>	<p>Organisasi sudah berupaya meningkatkan capaian kinerja baik output maupun outcome. Hal ini didasarkan atas Renstra yang telah dibuat dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja disertai dengan didukung Program dan Kegiatan serta Anggaran dikuatkan SDM yang professional. Dalam melakukan evaluasi capaian kinerja yang bersifat analisis selalu didukung dengan data yang andal, sehingga dapat diketahui capaian sebelumnya dan capaian sesudahnya yang bersifat perbandingan</p>	<p>Capaian Sasaran / Kinerja Output dan Outcome. Dokumen Renstra dan Dokumen Penetapan Kinerja. (terlampir) Data dukung mengenai informasi capaian kinerja. Dokumen Laporan Kinerja.</p>

	<p>informasi kinerja yang andal.</p> <p>c. Memanfaatkan informasi kinerja dalam laporan kinerja untuk umpan balik (feedback) perbaikan terhadap pelaksanaan program/kegiatan serta digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja yang dapat diandalkan.</p>	<p>terhadap capaian tahun sebelumnya.</p> <p>Informasi Kinerja yang sudah dituangkan dalam Laporan Kinerja merupakan informasi dari capaian kinerja yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang didukung program dan kegiatan, anggaran serta SDM.</p>	
4.	<p>Terhadap hasil evaluasi atas evaluasi internal agar:</p> <p>a. Meningkatkan hasil evaluasi program untuk dilaksanakan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk peningkatan kinerja.</p> <p>b. Melakukan evaluasi program dan hasil evaluasi tersebut dibuatkan rekomendasi untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja selanjutnya.</p> <p>c. Melakukan pemantauan atas rencana aksi dalam rangka pengendalian dan alternatif perbaikan kinerja setiap periode.</p> <p>d. Memanfaatkan hasil evaluasi program untuk ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan dalam bentuk langkah-langkah nyata.</p>	<p>Terhadap hal ini, akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan organisasi kami selanjutnya.</p> <p>Dalam meningkatkan kualitas evaluasi internal sudah kami laksanakan evaluasi kinerja per semester dengan demikian kinerja yang dilaksanakan lebih maksimal.</p>	<p>Setiap triwulan membuat laporan triwulan dan evaluasi. hal ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja organisasi dan meindaklanjuti kegiatan yang belum berjalan dengan demikian kinerja lebih optimal.</p>
5.	<p>Terhadap hasil evaluasi atas capaian sasaran/kinerja organisasi agar dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output maupun outcome) untuk tetap mengupayakan</p>	<p>Berkaitan hal ini, kami dalam rangka meningkatkan capaian kinerja baik output dan outcome, dengan melaksanakan evaluasi secara priodik dan melakukan</p>	<p>Melaksanakan evaluasi secara priodik dan melakukan rapat per semester.</p>

	peningkatan pencapaian sasaran/kinerja organisasi secara optimal, dengan target yang terukur sehingga dapat dicapai.	rapat per semester agar pencapaian sasaran, dan Kinerja organisasi tercapai optimal.	
--	--	--	--

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya ialah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja, tetapi juga outcome, manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan dan dicapai.

Sesuai Review Renstra yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar 98,80% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  
Pengukuran Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim  
Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas	Indeks Demokrasi	Indeks	82	Triwulan I	25	25	100%

	demokrasi di Kalimantan Timur	Indonesia			Triwulan II	25	25	100%
					Triwulan III	32	31,02	96.94%
					Triwulan IV	0	0	100%

### C. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, yaitu terdapat satu sasaran, dengan satu indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan terhadap satu sasaran dan satu indikator telah dicapai sebesar 98,80% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian pengukuran kinerja ini dapat dilihat pada hasil analisis capaian kinerja sebagai berikut:

#### Sasaran : Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur

Capaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Indeks Demokrasi Indonesia, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 5 (lima) program. antara lain: Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Dari lima program tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan, yakni:

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
  1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.

2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
  5. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan.
2. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik,
    1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
    2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
    3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
    4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

- Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
3. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
    1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
    5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
  4. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
    1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
    2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

- Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
  5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
5. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
  4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
6. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Adapun gambaran pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Tabel 3.4  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82	81,02	98,80%

Berdasarkan data diatas, perbandingan antara target dan realisasi dapat dilihat bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur persentase capaian kinerja sebesar 98,80%, capaian tersebut dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya;

Badan Kesbangpol Prov. Kaltim pada periode ini telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2019-2023 dalam menghadapi tantangan pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2019-2023. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 terhadap IKU dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan / penurunan Tahun 2022
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,99	81,02	-0.97%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi periode keempat IKU Badan Kesbangpol Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.97% dari tahun sebelumnya.

Indeks Demokrasi di Kalimantan Timur adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kalimantan Timur. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Kesetaraan dan Aspek Lembaga Demokrasi. Indeks Demokrasi Kalimantan Timur tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Angka Indeks Demokrasi Kalimantan Timur merupakan indikator untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan indikator pembangunan demokrasi. Rilis Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dilakukan setiap tahun, Indeks Demokrasi Kalimantan Timur dirilis H+1 dari tahun berkenan, sehingga Indeks Demokrasi Kalimantan Timur yang disajikan pada laporan ini merupakan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur Tahun 2021.

Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam Indeks Demokrasi Kalimantan Timur adalah Kebebasan Sipil (7 indikator di dalamnya), Aspek Kesetaraan (7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (8 indikator). Hasil Indeks Demokrasi Kalimantan Timur

disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:  $60 <$  Buruk;  $60-80$  Sedang;  $>80$  Baik.

Tabel 3.6  
Komponen Perhitungan Indeks Demokrasi Kalimantan Timur

No	Aspek	Indikator	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5
<i>I</i>	<i>Kebebasan Sipil</i>		89,46	<i>Baik</i>
1		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	92,65	
2		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	63,27	
3		Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	100,00	
4		Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	90,91	
5		Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	97,97	
6		Pemenuhan hak-hak pekerja	95,00	
7		Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	82,27	
<i>II</i>	<i>Kesetaraan</i>		76,67	<i>Sedang</i>
8		Kesetaraan Gender	87,88	
9		Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00	
10		Anti monopoli sumber daya ekonomi	59,50	
11		Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	63,58	
12		Kesetaraan Kesempatan Kerja Antar Wilayah	93,17	
13		Akses masyarakat terhadap informasi publik	75,41	
14		Kesetaraan dalam pelayanan dasar	72,49	
<i>III</i>	<i>Kapasitas</i>		77,90	<i>Sedang</i>

	<i>Lembaga Demokrasi</i>			
15		Kinerja Lembaga Legislatif	53,33	
16		Kinerja Lembaga Yudikatif	85,68	
17		Netralitas Penyelenggara Pemilu	77,27	
18		Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	72,73	
19		Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	75,06	
20		Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	100,00	
21		Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	78,00	
22		Pendidikan Politik pada kader partai politik	72,00	

Adapun sumber data yang digunakan dalam rangka pengukuran Indeks Demokrasi Kalimantan Timur, antara lain sebagai berikut:

- Dokumen Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, dsb;
  - Focus Group Discussion (FGD) Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder;
  - Wawancara mendalam Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari narasumber/ahli;
  - Surat Kabar Kab/Kota dengan oplah terbesar atau jangkauan terluas; dan
  - Big Data Verifikasi fakta yang diperoleh dari FGD dan WM dengan portal berita online.
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran startegis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan. Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim tahun 2022 dengan Rencana

Startegis (Renstra) Badan Kesbangpol Prov. Kaltim periode 2019-2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.7  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (Th. 2023)	Realisasi (Th. 2022)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	82,50	81,02	98,21%

Pada tabel 3.7 dapat dilihat bahwa terjadi kemajuan yang signifikan pada indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia, realisasi mencapai 81,02 dengan tingkat kemajuan 98,21%, hal ini tentu akan menjadi bahan acuan dalam menentukan target tahun-tahun berikutnya pada Renstra.

- Perbandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perbandingan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan realisasi standar Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional/Standar Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Standar Nasional	Lebih/Kurang
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	81,02	73,66	8,33%

Pada tabel 3.8 dapat dilihat bahwa terdapat kemajuan yang sangat signifikan pada indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Kaltim, perbandingan realisasi capaian secara nasional dengan tingkat kelebihan 8,33 %.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

### **Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja atau indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur**

Adapun upaya/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mendukung pengukuran dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur Tahun 2021 diantaranya:

1. Aspek Kebebasan Sipil, telah dilaksanakan kegiatan pada bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.
2. Aspek Kesetaraan, telah dilaksanakan program/kegiatan pada bidang Ideologi Wasbang & Karakter Bangsa.
3. Aspek lembaga demokrasi, telah dilaksanakan program/kegiatan di Bidang Politik Dalam Negeri, salah satu kegiatannya adalah memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebesar Rp.1200,- (seribu dua ratus) per suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBD yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2022 kepada Parpol sejumlah Rp1.949.686.800, . Pencairan bantuan keuangan Parpol tahun 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 469.2/K.34/2022 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

**Tabel 3.9**  
**Rincian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**  
**Yang Mendapatkan Kursi di DPRD**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

No	Penerima Bantuan	Perolehan Kursi	Perolehan Suara	Nilai Per Suara (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Partai Golkar	12	350.126	1.200	420.151.200
2	Partai PDIP	11	283.726	1.200	340.471.200
3	Partai Gerindra	8	223.738	1.200	268.485.600
4	Partai PKS	4	151.374	1.200	181.648.800
5	Partai democrat	3	122.576	1.200	147.091.200
6	Partai PAN	5	119.562	1.200	143.474.400
7	Partai PKB	5	114.241	1.200	137.089.200
8	Partai PPP	4	100.768	1.200	120.921.600
9	Partai Nasdem	2	95.159	1.200	114.190.800
10	Partai Hanura	1	63.469	1.200	76.162.800
	Jumlah	55	1.624.739		1.949.686.800

**Analisis penyebab kegagalan/kendala dalam pencapaian target:**

Adapun kendala dalam Pencapaian Target dan Penyelesaiannya, diantaranya masih terdapat 2 Indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu :

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi (59,50)

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif (53,33)

Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2021.

### **Alternatif solusi yang telah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan kedepan**

Meningkatkan konsolidasi dan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik beserta jajaran, Badan Kesbangpol Kab/Kota, Pokja Indeks demokrasi Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya upaya dalam Pencapaian dan Tindak Lanjut Indeks Demokrasi Kalimantan Timur ke depan, antara lain:

1. Pendidikan politik bagi masyarakat perlu dikaitkan dengan atau difokuskan pada persoalan ekspresi perbedaan berpendapat, khususnya dalam hal politik dan ekonomi. Digital literacy perlu ditekankan karena sebagian ekspresi, manipulasi pendapat, serta politik ketakutan (politics of fear) berlangsung lewat internet.
  2. Pemberian hibah bantuan keuangan partai politik dan evaluasi penggunaan bantuan keuangan partai politik.
  3. Pengembangan literasi politik bagi masyarakat dan pengurus lembaga demokrasi serta penerapan best practice dialog politik dan pendidikan politik.
  4. Kaderisasi partai perlu ditingkatkan, antara lain melalui pendidikan politik yang direncanakan dengan baik; integrasi antara aktivitas kaderisasi dengan dana bantuan partai politik.
  5. Audiensi dan sosialisasi dengan instansi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap transparansi anggaran terhadap dalam penguatan demokrasi lokal.
  6. Pemanfaatan sistem informasi dengan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan situasi politik dalam negeri berbasis digital.
  7. Pasca penerapan IDI Metode Baru, peran stakeholder di daerah sebagai Pembina untuk menjadikan Pokja IDI sebagai prioritas dan memaksimalkan masing-masing peran yang telah ditentukan.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran strategis dari sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022,

dapat mendukung efisiensi dalam kelancaran pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tabel 3.10  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur	98,80	96,70	2,1%

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas demokrasi di Kalimantan Timur antara lain:

#### 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Tabel 3.11  
Realisasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	7% (10.664)	10,72% (16.338)	153,20%

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan menunjukkan capaian sebesar 153,20%, capaian kinerja dapat dikategorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (4) Pelaksanaan Koordinasi di

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan (5) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 72,56% 100%, 93,12%,98,49%, dan 99,97%.

Data Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Daftar Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar SLTA Tahun 2022

No	Nama	Tahun 2022				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Provinsi Kalimantan Timur	300	-	6.114	9.300	15.714
2	Kota Samarinda	-	30	-	150	180
3	Kota Balikpapan	394	-	-	-	394
4	Kota Bontang	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-
6	Kabuapten Kutai Timur	-	-	-	-	-
7	Kabuapten Penajam Paser Utara	-	50	-	-	50
8	Kabuapten BeraU	-	-	-	-	-
9	Kabupaten Paser	-	-	-	-	-
10	Kabupaten Kutai Barat	-	-	-	-	-
11	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>694</b>	<b>80</b>	<b>6.114</b>	<b>9.450</b>	<b>16.338</b>

Kegiatan yang dilaksanakan dalam meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada tahun 2022 yaitu:

1. Kegiatan Sosialisasi bahaya paham Radikalisme dan Intoleransi SAT BINMAS Polres Penajam Paser Utara yang diselenggarakan Polresta PPU, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 di SMK Negeri 2 Penajam Paser Utara.
2. Kegiatan Pembinaan Pendidikan wawasan kebangsaan bagi pelajar SLTA, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022 di Kota Bontang.

3. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 di Ballroom Grand Jatra Hotel Balikpapan.
4. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi SLTA di Kota Samarinda, dihadiri peserta sebanyak 50 orang.
5. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi SLTA di kabupaten Penajam Paser Utara, dihadiri peserta sebanyak 30 orang.
6. Kegiatan Hari Lahir Pancasila, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 di Aula Ruhui Rahayu Kantor Gubernur di Samarinda.
7. Kegiatan Sosialisasi Gugus Tugas Revolusi Mental Bagi Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 di Kota Samarinda.
8. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli di Hotel Ika Petung Kabupaten PPU.
9. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus di Pendopo Wakil Bupati Kabupaten Kukar.
10. Kegiatan Hari Kesaktian Pancasila, dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2022 di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
11. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMA Negeri 1 Kota Samarinda.
12. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMA Negeri 2 Kota Samarinda.
13. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMA Negeri 5 Kota Samarinda.
14. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMA Negeri 11 Kota Samarinda.

15. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMK Negeri 1 Kota Samarinda.
16. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022, di SMK Negeri 2 Kota Samarinda.
17. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022, di SMK Negeri 3 Kota Samarinda.
18. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 4 November 2022, di SMK Medika Kota Samarinda.
19. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 14 November 2022, di SMK Negeri 4 Kota Samarinda.
20. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022, di Hotel Gran Senyur Kota Balikpapan.
21. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 16 November 2022, di Penajam Suite Hotel Kab PPU.
22. Kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) Bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022, di Hotel Bintang Sintuk Kota Bontang.
23. Kegiatan Pembauran bagi Pelajar SLTA, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022, di Hotel Bumi Senyur Kota Samarinda.
24. Kegiatan Hari Bela Negara, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022, di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur.

## 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Tabel 3.13  
Realisasi Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Penggunaan Hak-hak Politik	Persen	75%	72%	96%

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya sebesar 96%, capaian kinerja dapat dikategorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan

Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggarannya adalah 100%, 88,89%, 93,64%, 95,34% dan 98,61%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik yang menunjang capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Bidang Politik Dalam Negeri Tahun 2022 Kamis 3 Feb 2022.
2. Kegiatan Sosialisasi IDI kepada Aparatur dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2022 di Hotel Mercure Samarinda dengan peserta 100 orang.
3. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Poitik Bagi Masyarakat dan Disabiitas dilaksanakan pada tangga 31 Maret 2022 di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong dengan peserta 100 orang.
4. Rapat TP3D dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 di Hotel Haris dengan peserta 20 orang.
5. Rapat Tim Penilai Kenaikan Bantuan Keuangan Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi dan Kab/Kota dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 dengan peserta 20 Orang.
6. Kegiatan rapat pembahasan kenaikan bantuan keuangan kepada partai politik Kota Balikpapan, dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 di ruang kersik luwai, kantor gubernur provinsi Kalimantan timur, Samarinda.
7. Kegiatan dialog interaktif RRI Samarinda dalam rangka sosialisasi Pendidikan politik menghadapi pemilu serentak tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022.

8. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik bagi perempuan tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2022 di Hotel Mercure Samarinda.
9. Kegiatan Rapat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 di Ruang Kersik Luway Kantor Gubernur Kaltim, yang dihadiri peserta sebanyak 15 orang.
10. Kegiatan Rapat Persiapan Bimtek Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di Ruang Kersik Luway Kantor Gubernur Kaltim, yang dihadiri peserta sebanyak 10 orang.
11. Kegiatan Bimtek Verifikasi Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di Hotel Mercure Samarinda, peserta sebanyak 105 orang.
12. Kegiatan Rapat Penyusunan Perubahan Program Kerja Tahun 2022, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2022 di Ruang Kersik Luway Kantor Gubernur Kaltim, peserta sebanyak 14 orang.
13. Kegiatan Rapat Tim Pokja IDI Triwulan II, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Hotel Mercure Samarinda, peserta sebanyak 25 orang.
14. Kegiatan Rapat Tim TP3D Triwulan II, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, di Hotel Mercure Samarinda, peserta sebanyak 20 orang.
15. Kegiatan Rapat Penyusunan Program Kerja Tahun 2023, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 di Ruang Kersik Luway Kantor Gubernur Kaltim, peserta sebanyak 14 orang.
16. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik (Dialog Interaktif RRI) Daam Rangka Sosialisasi Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 September di RRI Samarinda, peserta sebanyak 25 orang.

17. Kegiatan Rapat Persipan Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 di Ruang Kersik Luway Kantor Gubernur Kaltim, peserta 15 orang.
18. Kegiatan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 di Hotel Midtown Samarinda, peserta sebanyak 102 orang.
19. Kegiatan Silaturahmi dan Penanda Tanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022, di Ruang Rapat Bina Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Gubernur Lantai 2 Gedung B.
20. Rapat Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam Rangka Evaluasi IDI Metode Baru 2021, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, di Ruang Jasmine Hotel Mercure Samarinda.
21. Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, di Grand Ballroom Hotel Grand Senyur Balikpapan.
22. Sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia Metode Baru, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022, di Grand Ballroom Hotel Grand Senyur Balikpapan.
23. Studi Kaji ke Provinsi Jawa Barat dalam Rangka Pendanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022, di Ruang Rapat Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.
24. Rapat Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Triwulan III Tahun 2022, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2022, di Santika Meeting Room (Hotel Santika), Bandung.
25. Coffee Morning Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dengan Pengurus Partai Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, di Ruang Rapat Bina Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Gubernur Lantai 2 Gedung B.

26. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Etika Budaya Politik bagi Masyarakat Berau, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022, di Grand Ballroom Hotel Bumi Segah Berau.
27. Rapat Koordinasi Teknis Bidang Politik dalam Negeri Tahun 2022, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022, di Hotel Grand Senyur Balikpapan.

### 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel 3.14  
Realisasi Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas Se Kaltim	Persen	32,70% (120 ormas)	40,05% (147 ormas)	122,5%

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam mendukung capaian sasaran, capaian kinerjanya sebesar 122,5% dapat dikategorikan **sangat baik**. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 97,53%, 31,81%, 99,86%, 98,28%, dan 99,91%.

Data Pembinaan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Data Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan**  
**Tahun 2022**

No	Nama	Nama Organisasi	Tanggal	Keperluan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Abdul Haris	Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur	02 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
	Basri Hasan	Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur	02 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
2	Abdul Rohim	Pelajar Islam Indonesia	03 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
3	Muhadi S	PW. Pemuda Muhammadiyah	11 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
4	Sony Indra, ST	Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mantin Indonesia	18 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
5	Muhammad Wahyudi	PW. KBB Prov. Kaltim	02 Maret 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
6	Agung Wijaya	Garda Gabungan Anak Kalimantan Bersatu (Gagak Bersatu)	30 Maret 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
7	Rahmansyah	Pemuda Pengawal Adat	04 Februari 2022	Konsultasi Masalah Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
	H. A. Sarpani	Pemuda Pengawal Adat	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
8	H. Surya Admaja	FKDM Kota Balikpapan	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Dwi Ida Cahyawati	FKDM Kota Balikpapan	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
9	Dede Syarif H	Senkom	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Gatot W	Senkom	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
10	A. Ahmad Yani	FKPB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Herlina Massolo	FKPB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
11	Eliza Feronika	KKT Jeneponto	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Sitti Marwiah, S.Pd	KKT Jeneponto	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
12	Shinta	NCW Pusat	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Yulia	NCW Pusat	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
13	Pdt. Timotius L	FKUB Balikpapan	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Ronny Chiang	FKUB Balikpapan	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
14	Abdul Sammid	Kayuh Baimbai	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas	Diskusi dalam bentuk kegiatan

				di Kota Balikpapan	
	Khairi Rahman	Kayuh Baimbai	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Iwan PS	Kayuh Baimbai	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
15	Bambang Supardio	Gabungan Aksi Roda Dua (Garda)	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Krismanto	Gabungan Aksi Roda Dua (Garda)	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
16	Edy Purnomo	Ahlulbait Indonesia	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Hettu Nonaliza, SH	Ahlulbait Indonesia	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
17	Moch. Arifin, SE	FPMKB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Soetoyo	FPMKB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
18	Zulkifli	Gepak Kuning	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Obedy	Gepak Kuning	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
19	Lampansar Bilvara	FPK	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Suntoro	FPK	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
20	Bambang Widijanito	PSHT	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Agung Subairi	PSHT	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Supriyadi	PSHT	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
21	Yulia Adams	Orari	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Asrianur	Orari	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
22	Awaludin	FBNRI	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Dedy Supardi	FBNRI	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
23	Bambang	PPAP	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Rambo	PPAP	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Sastra Oktabira	PPAP	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
24	Norcahjo	RAPI	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Taufik R	RAPI	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan

25	Agus	LIDIK	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Idehan	LIDIK	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
26	Babeh Jali	PMKB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Siti Aminah	PMKB	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
27	Yanuar R	Pemuda Pancasila	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Andi Amiruddin Solong	Pemuda Pancasila	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
28	Muh. Thokir, SE	Mada LMP Kaltim	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Heryanto, SE	Mada LMP Kaltim	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
29	Irna Damayanti	Pawin	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
	Abdul Rahim	Pawin	10 Maret 2022	Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Balikpapan	Diskusi dalam bentuk kegiatan
30	Irman Irawan	DPP. KERUKUNAN KELUARGA SUKU TOLAKI KALIMANTAN TIMUR	21 April 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
31	Rabin Subhananta	YAYASAN SELAMATKAN ANAK KITA (SEKATA) KALIMANTAN TIMUR	27 April 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
32	Kamariyono	ORGANISASI GABUNGAN TRANSPORTASI (ORGATRANS)	27 April 2022	Sosialisasi	Konsultasi datang ke kantor
33	Helda Yanti	PERKUMPULAN MASYARAKAT KAMPUNG KALIMANTAN TIMUR	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
34	Eliadi Koko Hariyono, S.H	LEMBAGA WATCH RELATION OF CORRUPTION	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
35	Akhmad Altazrie	LEMBAGA PENGAWASAN REFORMASI INDONESIA	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
36	Pdt. Cristoper Dilis, S.Th	ALIANSI PENDETA PRO PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
37	Ir. H. Alimuiddin Camma	DEWAN PIMPINAN WILAYAH WAHDAH ISLAMIAH KALIMANTAN TIMUR	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
38	CHARLES L. TOBING	HIMPUNAN PUTRA-PUTRI KELUARGA ANGKATAN DARAT (HIPAKAD)	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
39	Pdt. Hendri Suwito, S.Pd.B	PERSATUAN UMAT BUDDHA INDONESIA PENGURUS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
40	Panji Sukma Nugraha	PENGURUS KOORDINATOR CABANG PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KALIMANTAN TIMUR-UTARA (PKC PMII KALTIMRA)	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
41	Ir. Asmirilda, MP	DEWAN PENGURUS WILAYAH PERHIMPUNAN PENYULUH PERTANIAN	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan

		INDONESIA (DPW PERHIPTANI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
42	HM. Balfas Syam	PERKHIDMATAN RAKYAT KALIMANTAN TIMUR	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
43	Rizal Algamar	YAYASAN KONSERVASI ALAM NUSANTARA	Monday, June 13, 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
44	MUHAMMAD ALIANSYAH	KOETAI REMBUG NUSANTARA	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
45	FRANSISKA WLSH. M. SI	NALURI PEREMPUAN SETARA (NAPAS)	13 Juni 2022	Coffee Morning di Kab. PPU	Diskusi dalam bentuk kegiatan
46	Ahmad Fauzi Thoriqi Assegaf	DPW. ABI Kaltim	20 Juni 2022	Silaturahmi	Konsultasi datang ke kantor
47	Syafaruddin	PRKT	20 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
48	Sumaksinah	PEMP. Prov. Kaltim	20 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
49	Rina	TRC PPA Kaltim	22 Juni 2022	Koordinasi	Konsultasi datang ke kantor
50	Dayang Joyce	DPD. Iwapi Kaltim	22 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
51	Noor Falah	Kopadas	22 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
52	A. Rudi Fathmi	DPD. Gerakan Rakyat Anti Korupsi Kaltim	22 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
53	Hj. Eko Wijastuti	Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (PD IBI Kaltim)	28 Juni 2022	Koordinasi	Konsultasi datang ke kantor
54	Airin Noviyar Nurjani	DPW. MCM Kaltim	29 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
55	Muhammad Idris	Jatman Kaltim	29 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
56	Marcelo	Bela Negara	29 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
57	Jusril	Lembaga KPKPANRI	29 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
58	Guntur	Dewan Pengajuan Seni Adat Istiadat Prov. Kaltim	29 Juni 2022	Konsultasi	Konsultasi datang ke kantor
59	Mujiono	WANOK PONOROGO PERANTAUAN KOORDINATOR WILAYAH KALTIM	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
60	Kusnawan Hendra	DPD. HIMPUNAN PENGUSAHA ONLINE INTERNASIONAL (HIPO) PROV. KALTIM	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
61	Abdul Haris	BADAN PENGURUS PROVINSI KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR KALIMANTAN TIMUR-KALIMANTAN UTARA (BPP KBBKT-KU)	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
62	Rina Zainun	TIM REAKSI CEPAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
63	H.M. Agus Sutopo, MBA	DEWAN PIMPINAN DAERAH LENTERA INDEPENDEN PEMERHATI ASPIRASI NUSANTARA (LIPAN) KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
64	Drs. Achmadi, M.Si	DEWAN PIMPINAN PROVINSI IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA KALIMANTAN TIMUR (DPP IARMI)	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
65	Jusup Kristopo R, S.Sos	DEWAN PIMPINAN DAERAH GERAKAN PEMANTAU KINERJA APARATUR NEGARA	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan

		PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (DPD GEMPUR)			
66	Ratna Erviana	DEWAN PIMPINAN DAERAH GUGUS ANTISIPASI NARKOTIKA NUSANTARA KALIMANTAN TIMUR (DPD GANN)	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
67	Hj. Mahdalena HA, S.Pd, MM	KOMUNITAS INSAN PEJUANG (KIP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
68	Drs. H. Sumijan	DEWAN PIMPINAN WILAYAH JAM'IIYAH AHLI THORIQOH MU'TABAROH INDONESIA (DPW JATMI) KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
69	Suprpto	DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM SOLIDARITAS BORNEO (DPP-FSB) KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
70	Agus Eko Tungkono	YAYASAN FATHUL KAROMAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
71	Marianna Tukan	PEMUDA KATOLIK KOMISARIAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
72	Mulyono, S.Sos, M.Si	ASOSIASI ARSIPARIS INDONESIA (AAI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
73	Uswandi, S.H.I	DEWAN PENGURUS WILAYAH HIDAYATULLAH KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
74	Hartono, S.Pd	YAYASAN CINTA AMELIA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
75	S. Thariq Syekh Assegaf	DEWAN PENGURUS WILAYAH AHLULBAIT INDONESIA KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
76	H. Sudirman	DPW. IKATAN KELUARGA MINANGKABAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
77	Nathan Lillin	LEMBAGA PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN Keadilan (LP-KPK) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
78	Drs. H. Muhammad Syahrir, MH	PENGURUS WILAYAH LEMBAGA WAKAF DAN PERTAHANAN NAHDLATUL ULAMA (LWP-NU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
79	Ir. H. Pauzan Akhsan, SH	PENGURUS WILAYAH KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR KALIMANTAN TIMUR (PW KBBKT)	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
80	Hendra Gunawan	PERGERAKAN PEMUDA ASLI KALIMANTAN (GARDASIKAT) KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
81	Kaharuddin DG. Liwang, SE, MM	PENGURUS WILAYAH KERUKUNAN KELUARGA TURATEA (PW-KKT) JENEPONTO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
82	Suyanto	SENI TARI KUDA LUMPING CAMPUR SARI "PUTRO TURONGGO BUDOYO" KALIMANTAN	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan

		TIMUR			
83	Anwar Kholis	SQUAD PARIWISATA KALIMANTAN TIMUR (SPARTAN)	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
84	H. Sulaimansyah	YAYASAN SAYYIDAH KHADIJAH	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
85	Nurdin Djeja, SE	IKATAN WARTAWAN ONLINE (IWO) KALIMANTAN TIMUR	21 Juni 2022	Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat	Diskusi dalam bentuk kegiatan
86	Dr. Rahmawati, SE, MM	Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Kalimantan Timur	04 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
87	Dra. Sri Marini	Persatuan Istri Purnawirawan Pengurus Daerah Kalimantan Timur	04 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
88	Muhammad Yunus, S.P,S.Pd	Yayasan Lukmanul Hakim Kalimantan Timur	12 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
89	Muhadi Sucipto, ST	Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kalimantan Timur	14 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
90	Dony Oustria, S.Sos	Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Hutan Tanaman Rakyat Mandiri Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	25 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
91	Drs. Sobirin Bagus, MM	Himpunan Pengusaha Nahdliyin Kalimantan Timur	26 Juli 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
92	Andi Samudra	Dewan Pengurus Wilayah Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Timur	26 Agustus 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
93	Allwindo Chaniago	Dewan Pengurus Wilayah Forum Pemuda Bahari Indonesia Kalimantan Timur	26 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
94	Dr.H.Abdul Rais, SH, M.H	Dewan Pengurus Pusat Komando Adat Suku Kalimantan Bersatu	26 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
95	H. Abdul Syahrhan, S.H, M.Kes	Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia Kalimantan Timur	27 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
96	Supriyadi, S.E, S.H	Dewan Pimpinan Daerah Rumah Kebangkitan Berkarya Indonesia Kalimantan Timur	28 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
97	Dony Khoiril Dermawan	Indonesia Escorting Ambulance Samarinda	29 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
98	Setiawati	Pengurus Daerah Perkumpulan Forum Tenaga Ahli Lingkungan Indonesia Kalimantan Timur	29 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
99	Ir. Robby Marzuki, S.T., M.T	Forum Socio Engineering Nusantara	30 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
100	Syamsuddin	Kerukunan Keluarga Selawesi Selatan Kalimantan Timur	30 September 2022	Konsultasi Pendaftaran Organisasi	Konsultasi datang ke kantor
101	Yasser Arafat	APRI	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
102	Suwarto	SENKOM	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
103	Hadi B.	PAMMI PASER	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
104	Norhamin	PMKB	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
105	Ahmad Guntoro	PCNU	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan	Diskusi Dalam

				Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Bentuk Kegiatan
106	Syarif Hidayatullah	PD MUHAMMADIYAH PASER	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
107	Anggi Syahputra	PELINDO	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
108	Rudiansyah	PASAK BAKUDAPATI	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
109	Wa'an	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
110	Ahmad Raro	PWI	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
111	M. Jamhuri	KBBKT PASER	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
112	Almiansyah	SANGGAR TARI	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
113	Syahruni Mb.	LASKAR GEPAK	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
114	Abdul Muhni	LASKAR BANJAR DALAS HANGIT	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
115	Suryadi	PM. TBBR	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
116	Bunyamin	PKBM TUDANG SIPULUNG	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
117	H. Adi	GEPAK	10 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kabupaten Paser	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
118	Komsiatun	YAYASAN RUMAH BAHAGIA	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
119	Muliyana	MUSLIMAT HIDAYATULLAH	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
120	Raudatul Jannah	OWBB	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
121	Suhono	PL2KB	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
122	Abdul Sami	BAKUDA	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
123	Syahruni Mb.	LPMBT	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
124	Benny Lengkong	K3B KAWAMA	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
125	Nasira	PWL RAYA	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
126	Darwis Setyawan	PWK KOMRI	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
127	Haluah	LEMBAGA ADAT KUTAI BK	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
128	Iriang	KERUKUNAN KEL. KAWANUA K3B	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
129	Bayu Wijaya	YNCI	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan

				Bontang	
130	Widiyanti	KAWAN BONTANG	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
131	Lukmanul Hakim	BKM	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
132	Lin Pontoh	KARTINI BERKARYA BONTANG	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
133	Setiyabudi	IKS.PI KERASAKTI	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
134	Siti Sholehati	BUNDA KREATIF	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
135	Hj. HATIMAH	KKBAB	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
136	Yosef	ISKEB	17 November 2022	Pelaksanaan Kegiatan Coffee Morning Di Kota Bontang	Diskusi Dalam Bentuk Kegiatan
137	Ir. HERU CAHYONO	FORUM SOCIO ENGINEERING NUSANTARA	11 Oktober 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
138	Didi Amista	DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM PETANI KELAPA SAWIT (FPKS) KALIMANTAN TIMUR	22 November 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
139	Andry Septyandi	DEWAN PENGURUS WILAYAH PROFESIONAL JARINGAN MITRA NEGARA (DPW-PROJAMIN KALIMANTAN TIMUR	22 November 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
140	Junaidi	KERUKUNAN WARGA KHATULISTIWA KALIMANTAN TIMUR	20 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
141	Ir. MUH. ANWAR M, ST	DEWAN PENGURUS DAERAH PERKUMPULAN TENAGA AHLI KONSULTAN INDONESIA (PERTAHKINDO) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
142	Yusnani	KELOMPOK TANI DAYAK LESTARI GRUP TIGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
143	Desi Aryani	YAYASAN SELAMATKAN ANAK KITA (SEKATA) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
144	Fajriansyah	DEWAN PIMPINAN DAERAH PELANGI GARUDA INDONESIA (PEGARINDO) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	20 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
145	Hj. Mahdalena Ha, S.Pd, Mm	PENGURUS PROVINSI KOMUNITAS JALAN SEHAT KALIMANTAN TIMUR	23 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
146	Drs. H. Muslim	PIMPINAN WILAYAH ITTIHAD PERSAUDARAAN IMAM MASJID (IPIM) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	23 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor
147	Dovist Calvino	IKATAN KELUARGA BESAR SRIWIJAYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	23 Desember 2022	Konsultasi	Konsultasi Datang Kekantor

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang menunjang capaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas dan Badan/Lembaga di Daerah, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 15 Februari Tahun 2022 di Kota Balikpapan.
2. Kegiatan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022.
3. Kegiatan Verifikasi Hibah dan Bansos, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Februari tahun 2022 di Samarinda.
4. Kegiatan Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 April Tahun 2022 di Kota Samarinda.
5. Kegiatan Kegiatan Verifikasi Data Ormas se Kaltim, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Mei tahun 2022 di Kota Samarinda.
6. Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat melalui Jalin Kemitraan untuk Membina serta Meningkatkan Peran Ormas dalam Pembangunan di Kaltim serta mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Mei tahun 2022 di Kota Samarinda.
7. Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas dan Badan/Lembaga di Daerah, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juni tahu 2022 di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Kegiatan Mewujudkan Kaltim Berdaulat melalui Jalin Kemitraan untuk Membina serta Meningkatkan Peran Ormas dalam Pembangunan di Kaltim serta mensukseskan Pemilu Serentak Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022 di Kota Samarinda.
9. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pengawasan Ormas Semester III, dilaksanakan pada tanggal 20 September 2022.
10. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Hibah dan Bansos Triwulan III, dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022.

11. Kegiatan Rapat Penyusunan Anggaran Perubahan tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2022.
12. Kegiatan Penyusunan Anggaran Tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022.
13. Kegiatan Rapat Verifikasi Data Ormas Se-Kaltim Seemster II, dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2022.
14. Kegiatan Rapat Tim Verifikasi Hibah dan Bansos Triwulan IV, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022.
15. Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kabupaten Paser, dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022.
16. Kegiatan Coffee Morning dengan Ormas di Kota Bontang, dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022.

#### 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Tabel 3.16  
Realisasi Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Persen	100% (4 Rekomendasi)	100% (4 Rekomendasi)	100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kerjanya sebesar 100% dapat dikategorikan sangat baik. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Masing-masing capaian realisasi anggrannya 65,93%, 36,84%, 95,02%, 99,88% dan 99,98%.

Data daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama yang dikeluarkan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17  
Daftar Rekomendasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tanggal	Nomor	Ket
1	2	3		4
1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilaksanakan operasi pasar yang berkelanjutan melalui dinas terkait sampai harga minyak goreng dipasaran sampai pada harga yang ditetapkan oleh pemerintah</li> <li>2. Perlu dilakukan penegakan hukum, terhadap penimbun minyak goreng yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat</li> </ol>	31 Maret 2022	500 /388.1 / III-BKP / III / 2022	
2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan revisi Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;</li> <li>2. Perlu dilakukan penegakan hukum, terhadap tindakan penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ol>	30 Juni 2022	896 / 680.1 / III-BKP/ VI /2022	
3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga.</li> <li>2. Menjaga dan mengawasi proses</li> </ol>	12 Oktober 2022	500 / 981 /III-BKP/X/2022	

	penyaluran BLT agar tepat sasaran. 3. Mendorong Kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan pemerintah untuk memberikan kompensasi bantuan langsung tunai (BLT); 4. Perlu dilakukan penegakan hukum, terhadap tindakan penimbunan BBM dan bahan pokok keperluan masyarakat			
4	1. Memperkuat fungsi Satgas Pangan dalam distribusi dan pengawasan harga, terutama harga pangan agar inflasi pangan tetap terkendali dan tidak terdapat penimbunan/permainan harga. 2. Memastikan kecukupan pasokan maupun harga kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur yang stabil. 3. Optimalisasi penggunaan anggaran belanja wajib perlindungan sosial dari DTU juga terus didorong hingga akhir tahun untuk mendukung pencapaian inflasi Indonesia tahun 2022 tetap terkendali	9 Desember 2022	500/1305/III-BKP/XII/2022	

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Dialog antar umat beragama, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 di Samarinda.
2. Kegiatan Pembinaan Karya Seni dan Budaya sebagai perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 di samarinda.
3. Kegiatan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022 di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta.
4. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bontang, dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2022.
5. Kegiatan Rapat Penyusunan Anggaran Perubahan Tahun 2022, dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022.

6. Kegiatan Rapat Penyusunan Anggaran tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 15 September 2022.
7. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di Daerah Semester I, dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2022.
8. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanggal 25 Agustus dan 4 Oktober 2022.
9. Kegiatan rapat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Seluruh Kab/Kota Se-Kalimantan Timur, dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2022.
10. Rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Semester II, dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2022.
11. Kegiatan rapat Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan agama Se-Kaltim, dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2022.
12. Kegiatan rapat Tim Terpadu Pencegahan dan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama di Daerah Semester II, dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022.
13. Kegiatan rapat koordinasi teknis pembinaan kepada pemerintah Kab/Kota di Kalimantan Timur terkait pelaksanaan system informasi manajemen ketahanan sosial dan budaya, dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022.

#### 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.18  
Realisasi Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Tahun 2022

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Kalimantan Timur	Persen	33,33% (101)	33,66% (102)	100,99%

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial juga mendukung capaian kinerja, realisasi capaian kerjanya sebesar 100,99% dapat dikategorikan **sangat baik**, penanganan konflik sejumlah 24 yang tertangani, potensi konflik terselesaikan sebesar 64, dan penyelesaian masalah sebanyak 24, total keseluruhan sebanyak 102. Program ini terdiri dari lima sub kegiatan yaitu Kegiatan (1) Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta Penanganan Konflik di Daerah (2) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (3) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (4) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (5) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Masing-masing capaian realisasi anggrannya 33,33%, 92,21%, 88,32%, 88,32%, 99,37% dan 93,77%.

Daftar Data Konflik, Potensi Konfil dan Penyelesaian Masalah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19  
Daftar Data Konflik, Potensi Konflik dan Penyelesaian Masalah  
Tahun 2022

No	Nama	Tahun 2022			Total
		Data Konflik	Potensi Konflik	Penyelesaian Masalah	
1	2	3	4	5	7
1	Kota Samarinda	10	24	8	42
2	Kota Balikpapan	1	4	-	5
3	Kota Bontang	1	6	2	9
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	5	7	3	25
5	Kabupaten Kutai Timur	-	2	1	3
6	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	6	3	10
7	Kabupaten Berau	1	5	5	11
8	Kabupaten Paser	-	3	2	5
9	Kabupaten Kutai Barat	1	1	-	2
10	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>58</b>	<b>24</b>	<b>102</b>

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan rapat tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di Samarinda.
2. Melaksanakan kegiatan rapat Tim Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga/Organisasi Asing Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2022 di Samarinda.
3. Melaksanakan kegiatan rapat Tim Kewaspadaan Dini, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di Samarinda.
4. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kuartal I), dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 April tahun 2022 di Samarinda yang dihadiri oleh peserta OPD dan Instansi terkait.
5. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Menjelang Pemilu 2024 Serta Menyukseskan Perpindahan Ibu

- Kota Negara, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Mei tahun 2022 di Samarinda, yang dihadiri oleh Kepala Sekolah/Guru Pembimbing/Siswa, Forum – Forum mitra pemerintah.
6. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Intelijen, dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 9 Juni tahun 2022 di Samarinda, dengan peserta Aparatur Kesbangpol Kabupaten/Kota se- Kalimantan Timur.
  7. Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Sosial Politik Dalam Rangka Cipta Kondisi Sukses Pemilu Serentak 2024 di Kota Samarinda, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, peserta OPD/Instansi Terkait, Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum – Forum Masyarakat.
  8. Kegiatan Sosialisasi/Diseminasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya tahun 2022, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 di Haris Hotel Samarinda, peserta sebanyak 100 orang.
  9. Kegiatan rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial “mengoptimalkan sinergitas dalam meningkatkan efektivitas penanganan gangguan konflik sosial dalam bentuk deteksi dini dan pencegahan dini tahun 2022”, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 di Hotel Mercure Samarinda, peserta sebanyak 100 orang.
  10. Kegiatan Forum Komunikasi Sosial Politik dalam cipta kondisi sukses pemilu serentak Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 di Hotel Senyuir Samarinda, peserta 100 orang.
  11. Kegiatan rapat Tim Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah Prov Kaltim, dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2022, di ruang resik luway kantor Gubernur Kaltim, peserta 15 orang.
  12. Kegiatan komunikasi sosial “membangun sinergitas dan harmonisasi antar masyarakat menjelang pemilu 2024,

- dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 di Hotel Haris Samarinda, peserta sebanyak 100 orang.
13. Kegiatan rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 di ruang resik luway kantor Gubernur Kaltim, peserta 25 orang.
  14. Kegiatan rapat Wasdin, dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 di ruang resik luway kantor Gubernur Kaltim, peserta 25 orang.
  15. Kegiatan rapat Tim Panji Keberhasilan Pembangunan Bidang Kondusifitas Daerah Prov Kaltim, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2022, di ruang resik luway kantor Gubernur Kaltim, peserta 15 orang.
  16. Kegiatan Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2022, di Ruang Rapat Kersik Luway Badan Kesbangpol Prov. Kaltim.
  17. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kaji FKDM & FKPT Prov. Kaltim di Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta), dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2022, di Ruang Rapat Utama Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta.
  18. Kegiatan Tim Verifikasi dan Rekomendasi Keterangan Penelitian Prov. Kaltim, dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022, di Ruang Rapat Kersik Luway Badan Kesbangpol Prov. Kaltim.
  19. Kegiatan Dialog Kewaspadaan Dini dengan Tema "Peranan Elemen Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Konflik di Kabupaten Penajam Paser Utara, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022, di Pantai Istana Amal, Penajam Paser Utara.
  20. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Dengan Tema Peran Intelektual Muda Dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme Menjelang Pemilu 2024 Serta Menyukseskan Perpindahan Ibu Kota Negara, dilaksanakan pada tanggal 17 November 2022, di Hotel Bluesky Balikpapan.

#### D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini disajikan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut :

##### 1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai satu Sasaran Strategis yang harus dilaksanakan. antara lain dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20  
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Demokrasi Indonesia	82	81,02	98,80%	Rp 82.166.190.481.-	Rp 79.456.846.717,-	96,70%
<b>Jumlah</b>					Rp 82.166.190.481.-	Rp 79.456.846.717,-	96,70%
<b>Total Belanja Modal</b>					<b>Rp 1.482.666.000,-</b>	<b>Rp. 1.479.989.828,-</b>	<b>99,82%</b>

##### 2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

Adapun realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim tahun 2022 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

Tabel 3.21  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	14.187.826.391.00	12.014.868.715.00	84.68	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	363.576.000.00	359.810.234.00	98.96	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.798.000.00	9.798.000.00	100.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	353.778.000.00	350.012.234.00	98.94	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.246.998.935.00	8.141.694.896.00	79.45	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.791.846.935.00	7.715.042.445.00	78.79	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47.560.000.00	21.240.000.00	44.66	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	346.320.000.00	346.320.000.00	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.272.000.00	59.092.451.00	96.44	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.636.000.00	9.586.500.00	99.49	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	9.636.000.00	9.586.500.00	99.49	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	51.000.000.00	42.840.000.00	84.00	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.000.000.00	42.840.000.00	84.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.961.118.000.00	1.951.919.166.00	99.53	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	811.508.000.00	808.083.353.00	99.58	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.011.000.00	44.928.953.00	99.82	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.660.000.00	24.658.300.00	99.99	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.520.000.00	11.520.000.00	100.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	971.400.000.00	966.427.513.00	99.49	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	971.400.000.00	966.427.513.00	99.49	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	788.750.000.00	788.750.000.00	100.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	788.750.000.00	788.750.000.00	100.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000.00	15.000.000.00	100.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.00	1.465.404.00	97.69	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	415.385.256.00	411.026.280.00	98.95	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	415.385.256.00	411.026.280.00	98.95	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.854.000.00	56.054.060.00	90.62	
2	<i>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</i>	40.411.800.00	40.385.100.00	99.93	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	40.411.800.00	40.385.100.00	99.93	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	1.671.848.000.00	1.583.278.400.00	94.70	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	18.000.000.00	13.676.760.00	75.98	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	5.280.000.00	5.280.000.00	100.00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	287.500.000.00	283.338.998.00	98.55	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	163.200.000.00	1.607.42.261.00	98.49	
3	<i>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</i>	310.800.000.00	310.718.101.00	99.97	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	310.800.000.00	310.718.101.00	99.97	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.789.323.800.00	3.701.176.047.00	97.67	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di	1.949.686.800.00	1.949.686.800.00	100.00	

	Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.240.000.00	2.880.000.00	88.89	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	388.400.000.00	351.834.598.00	90.59	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	378.000.000.00	360.381.599.00	95.34	
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	453.600.000.00	447.304.950.00	98.61	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	453.600.000.00	447.304.950.00	98.61	
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	453.600.000.00	447.304.950.00	98.61	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18.000.000.00	17.950.400.00	99.72	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.509.000.00	480.000.00	31.81	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	56.839.837.290.00	56.839.837.290.00	100.00	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	108.000.000.00	106.144.080.00	98.28	
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	201.600.000.00	201.425.200.00	99.91	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	201.600.000.00	201.425.200.00	99.91	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	201.600.000.00	201.425.200.00	99.91	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	364.000.00	240.000.00	65.93	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1.303.000.00	480.000.00	36.84	

	Penghayat Kepercayaan di Daerah				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	34.000.000.00	26.520.000.00	78.00	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	108.000.000.00	107.868.133.00	99.88	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	176.400.000.00	176.362.900.00	99.98	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	176.400.000.00	176.362.900.00	99.98	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	176.400.000.00	176.362.900.00	99.98	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	720.000.00	240.000.00	33.33	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.848.000.00	1.704.000.00	92.21	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	275.845.000.00	255.987.465.00	92.80	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	246.800.000.00	232.693.680.00	94.28	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	216.000.000.00	214.566.268.00	99.34	
	Total Belanja Daerah	82.166.190.481.00	79.456.846.717.00	96.70	

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi per program kegiatan diatas 96,70 % hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran melalui DPA Murni dan Perubahan sebesar Rp. 82.166.190.481,- yang terdiri dari 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 80.683.524.481,- yang diperuntukan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Proses penggunaan anggaran Belanja Operasi pada umumnya sudah berjalan sebagaimana jadwal yang direncanakan, hal ini terlihat dari realisasi penggunaan dana tidak mendapat kendala, realisasi fisik 100% dan keuangan sebesar Rp. 77.976.856.889,- atau 96,65%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp.1.482.666.000,- dimana sampai dengan 31 Desember 2022 semua program kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi fisik 100%. dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.479.989.828,- atau 99,82%.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja Badan Kesbangpol Prov. Kaltim**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah atas petunjuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dapat dilaksanakan dengan kategori **Sangat Baik**, hasil laporan akuntabilitas kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 98,80%, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil yang optimal.

### **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Yang Akan Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur di masa mendatang antara lain yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi kesalahan/keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program/kegiatan tahun selanjutnya.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

4. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
5. Menguatkan komitmen dari semua Bidang untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur ini disampaikan, untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan di tahun-tahun mendatang.

Samarinda, 03 Januari 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Kalimantan Timur

**Drs. Sufian Agus. M.Si**  
**Pembina Utama Muda IV/c**  
**NIP. 196602041988031016**